

Evaluasi kinerja petugas medis dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit di fasilitas kesehatan

Dr. J. Hansen¹, Dr. M. Larsen¹, Dr. P. Nielsen^{1*}

¹ Department of Internal Medicine and Clinical Research, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark

Info Artikel

Keywords:

Performance of Officers,
Protecting and Preserving,
Flora and Fauna

Abstract

The purpose of this study was to determine the performance of the Kerinci Seblat National Park Management Agency's Bungo National Park Management Section in protecting and preserving flora and fauna. The research method used by researchers is a descriptive method with a qualitative approach. The population in this study is the Head of the National Park Management Section (SPTN) and the entire staff of the Bungo Region II National Park Management Section, with a sample of 10 (ten) people. Sampling uses a purposive sampling technique. Research results The performance of the Kerinci Seblat National Park Central Park Management Officer in the Bungo Region II National Park in protecting and conserving flora and fauna has been carried out in accordance with the Technical Guidelines, but not yet optimal due to limited budgets in carrying out flora and fauna control and protection. Constraints faced by the parties Kerinci Seblat National Park Center for Management of the Bungo Region II National Park in protecting and preserving flora and fauna is the lack of implementing officers who supervise the Kerinci Seblat National Park (TNKS). With an area of ± 86,363.77 hectares compared to 8 officers / employees, it is not ideal, to ideally require 14 officers / employees assuming 1 officer supervises about 6,168.84 hectares of forest area. Facilities and infrastructure in the implementation of flora protection and preservation and fauna in the Kerinci Seblat National Park area (TNKS) are inadequate, such as 4-wheeled patrol operational vehicles, only 1 (one) unit, 2-wheeled vehicles, 2 (two) units, GPS only 1 (one) unit, camera 1 (one) unit damaged condition, there is no Suunto compass, complete personnel / officers (personal use), including the guard post / pondok work resort of Bungo TNKS, so far not yet available. Ideally, each facility and infrastructure above 4 (four) units with 1 (one) Management Section designation and 3 (three) TNKS resorts, and special 2-wheeled vehicles, each Forest Police personnel have 1 (one) unit. Efforts made by the Central Office of the Kerinci Seblat National Park Management Section for Bungo Region II National Park to overcome these problems are to increase cooperation and communication with the community around the TNKS area, in addition to counseling / socialization as well as forming partnership with the Forestry Partners Community (MMP) as an extension of obtaining information regarding the disturbance of the TNKS forest area. Submitting proposals for the provision of facilities and infrastructure to support the main supervision / patrol and carry out education and training to improve the skills and abilities of officers in protecting and preserving flora and fauna.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja petugas Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bungo dalam melindungi dan melestarikan flora dan fauna. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) dan seluruh staf Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah II Bungo, dengan sampel berjumlah 10 (sepuluh) orang. Pengambilan sampel menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Hasil penelitian Kinerja petugas Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bungo dalam melindungi dan melestarikan flora dan fauna sudah dijalankan sesuai dengan Petunjuk Teknis, namun belum optimal karena terbatasnya anggaran dalam melaksanakan pengawasan dan perlindungan flora dan fauna. Kendala yang dihadapi pihak Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bungo dalam melindungi dan melestarikan flora dan fauna adalah masih kurangnya petugas pelaksana yang melakukan pengawasan di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Dengan luas kawasan mencapai $\pm 86.363,77$ hektar berbanding 8 orang petugas/pegawai sangatlah tidak ideal, untuk idealnya diperlukan 14 orang petugas/pegawai dengan asumsi 1 orang petugas mengawasi sekitar 6.168,84 hektar kawasan hutan. Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan perlindungan dan pelestarian flora dan fauna di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) kurang memadai seperti kendaraan operasional patroli roda 4 hanya 1 (satu) unit, kendaraan roda 2 ada 2 (dua) unit, GPS hanya 1 (satu) unit, kamera 1 (satu) unit kondisi rusak, kompas suunto belum ada, kelengkapan personil/petugas (*personal use*), termasuk pos jaga/pondok kerja resort TNKS Bungo hingga saat ini belum ada. Idealnya masing-masing sarana dan prasarana di atas 4 (empat) unit dengan peruntukan 1 (satu) Seksi Pengelolaan dan 3 (tiga) resort TNKS, dan khusus kendaraan roda 2 masing-masing personil Polhut memiliki 1 (satu) unit. Upaya yang dilakukan pihak Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bungo guna mengatasi masalah-masalah tersebut adalah meningkatkan kerjasama dan komunikasi dengan masyarakat sekitar kawasan TNKS, selain penyuluhan/sosialisasi juga dengan membentuk kemitraan Masyarakat Mitra Polhut (MMP) sebagai perpanjangan tangan memperoleh informasi mengenai gangguan kawasan hutan TNKS. Mengajukan usulan pengadaan sarana dan prasarana pendukung utama pengawasan/patroli dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan keterampilan dan kemampuan petugas dalam melindungi dan melestarikan flora dan fauna.

1. Pendahuluan

Hutan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Mandat pembangunan bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya termaktub dalam beberapa regulasi dan atau kebijakan pemerintah. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengamanatkan untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya melalui tiga embanan, yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Dalam mendukung pembangunan nasional, langkah-langkah konservasi diperlukan sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri. Tiga pilar pembentuk konservasi keanekaragaman hayati, yaitu pilar perlindungan, pilar pengawetan dan pilar pemanfaatan harus saling bersinergi dan diseimbangkan guna mendukung suksesnya konservasi sumber daya alam hayati.

Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) merupakan salah satu kawasan Konservasi yang berada di Pulau Sumatera yang memiliki luas 1.389.509,867 hektar, Taman Nasional Kerinci Seblat pertama kali diumumkan sebagai salah satu calon Taman Nasional dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 736/Mentan/X/1982 tanggal 10 Oktober 1982, kawasan ini merupakan gabungan dari beberapa kawasan seperti : Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Wisata, dan Hutan Lindung. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1049/KPTS-II/1992 tanggal 12 November 1992, berubah organisasi menjadi Unit Taman Nasional Kerinci Seblat, kemudian muncul Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 192/KPTS-II/1996 tanggal 1 September 1996 menetapkan Luas Kawasan TNKS 1.368.000 hektar, dan berubah luasannya melalui Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 901/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 menjadi 1.375.349,867 hektar. Tahun 2004, Menteri Kehutanan menetapkan perubahan fungsi kawasan hutan produksi di Sipurak Hook seluas ± 14.160 Ha menjadi bagian dari kawasan TNKS dengan Surat Keputusan Nomor 420/Menhut-II/2004, sehingga luas TNKS menjadi ± 1.389.509,867 hektar.

Balai Besar TNKS sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku pengelola kawasan konservasi yang dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah Bidang Pengelolaan Taman Nasional (BPTN), yaitu BPTN Wilayah I Jambi, BPTN Wilayah II Sumatera Barat, dan BPTN Wilayah III Bengkulu-Sumatera Selatan.

BPTN Wilayah I Jambi terbagi menjadi 2 (dua) wilayah Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN), yaitu SPTN Wilayah I Kerinci dan SPTN Wilayah II Bungo. SPTN Wilayah II Bungo secara administratif pemerintahan terletak di 2 (dua) wilayah kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin. Kawasan TNKS yang menjadi areal kerja SPTN Wilayah II Bungo ditetapkan menjadi 3 (tiga) resort yaitu Resort Bungo, Resort Merangin Utara dan Resort Merangin Selatan. Adapun luas kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) SPTN Wilayah II Bungo per Resort dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1
Luas kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah II Bungo per Resort

No	Resort SPTN Wilayah II Bungo	Luas Kawasan Hutan (Hektar)
1	Resort Bungo	86.363,77
2	Resort Merangin Utara	60.170,77
3	Resort Merangin Selatan	95.885,28
	Jumlah	242.419,82

Sumber: Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), 2019.

Berdasarkan tabel 1 di atas terdapat luas kawasan TNKS Resort Bungo luas kawasan TNKS ±86.363,77 hektar (6,22% kawasan TNKS), Resort Merangin Utara, luas ± 60.170,77 hektar (4,33% kawasan TNKS), Resort Merangin Selatan seluas ±95.885,28 hektar (6,90% kawasan TNKS). Khususnya untuk Resort Bungo yang meliputi beberapa wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Bathin III Ulu seluas 30.458,80 hektar, Kecamatan Pelepat seluas 13.046,06 hektar, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang seluas 42.858,91 hektar.

Tabel 2
Luas kawasan TNKS Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN)
Wilayah II Bungo Resort Bungo Per wilayah Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Kawasan (hektar)
1	Bathin III Ulu	30.458,80
2	Pelepat	13.046,06
3	Limbur Lubuk Mengkuang	42.858,91
	Jumlah	86.363,77

Sumber: Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), 2019.

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dijelaskan bahwa luas kawasan TNKS Resort Bungo per wilayah kecamatan memiliki berbagai sumber daya alam yang perlu dilindungi dan dilestarikan seperti halnya flora dan fauna, selain itu dalam pengelolaan TNKS juga dibutuhkan sumber daya manusia yang memadai dan berkompeten sebagai petugas dalam melaksanakan tugas pengelolaan TNKS.

Petugas pelaksana pengelola TNKS Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bungo berjumlah 20 (dua puluh) orang petugas yang terdiri dari 14 (empat belas) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditambah dengan tenaga kontrak Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP) sebanyak 6 (enam) orang yang merupakan masyarakat asli dusun setempat yang berdomisili di desa sekitar kawasan TNKS. Untuk Kabupaten Merangin petugas pelaksana sebanyak 10 (sepuluh) orang terdiri dari 7 (tujuh) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 3 (tiga) orang Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP). Khusus untuk petugas Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bungo dan Resort Bungo jumlah petugas 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 7 (tujuh) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 3 (tiga) orang Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP).

Perlindungan dan pelestarian terhadap keanekaragaman hayati berupa flora dan fauna yang ada sangat potensial untuk menciptakan berbagai varietas unggul flora maupun fauna. Namun data dan informasi tentang keanekaragaman hayati yang ada di TNKS masih perlu terus dilengkapi dan diperbaharui sehingga diperlukan peningkatan intensitas pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi keanekaragaman hayati di lapangan. Adapun data dan informasi flora dan fauna di kawasan hutan TNKS SPTN Wilayah II Bungo Resort Bungo dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3
Daftar Flora dan Fauna yang ada di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) SPTN
Wilayah II Bungo

No	Flora (Tumbuhan)	No	Fauna (Satwa)
1	Anggrek Hutan	1	Harimau Sumatera
2	Kantong Semar	2	Kucing Hutan Sumatera
3	Amorpophallus (Bunga Bangkai)	3	Ayam Hutan
4	Durian Hutan	4	Burung Kuau (Merak Sumatera)
5	Kayu Meranti-merantian	5	Burung Rangkong
6	Rotan –rotanan	6	Trenggiling
7	Embacang Hutan	7	Napu (Kancil)

	8	Rungko
	9	Tapir
	10	Beruang
	11	Rusa Sambar
	12	Gajah Sumatera

Sumber: Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), 2019.

Pelaksanaan pengelolaan dalam perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati flora dan fauna yang terdapat di dalam kawasan hutan TNKS diperlukan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dimaksud diperlukan pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, perlu dilakukan penilaian prestasi kerja melalui Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal mewujudkan Pelaksanaan Kinerja Petugas Balai Besar TNKS yang optimal diperlukan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang tepat, terukur dan terarah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud dengan Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun. Indikator kinerja individu adalah ukuran keberhasilan kerja yang dicapai oleh setiap PNS. Target adalah jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan. Realisasi adalah hasil kerja yang diperoleh sebagian, sesuai atau melebihi target. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kenyataannya pencapaian sasaran kerja masih sulit karena kondisi di hutan yang sulit diduga, disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung bidang perlindungan dan pelestarian hutan sehingga target beban kerja yang akan dicapai ataupun sasaran kerja menjadi sulit dicapai, selain itu keterbatasan sumber daya manusia atau jumlah petugas TNKS yang melakukan pengawasan dibandingkan dengan luas hutan TNKS kurang ideal sehingga akan menjadi permasalahan dalam upaya peningkatan kinerja terhadap perlindungan dan pelestarian flora dan fauna yang ada di kawasan hutan TNKS. Idealnya dalam satu kawasan TNKS seorang petugas pengawasan mampu melakukan pengawasan dengan berjalan kaki (patroli rimba) sejauh 3 kilometer persegi dan jumlah hari kerja selama 1 bulan sebanyak 22 hari kerja, jika luas TNKS Seksi Wilayah II Bungo dan Resort Bungo memiliki luas lahan 86.363,77 Ha, maka idealnya memiliki petugas pengawasan sebanyak 14 orang petugas.

Dari pengamatan awal peneliti terdapat beberapa fenomena dalam kegiatan pelaksanaan perlindungan dan pelestarian flora dan fauna di kawasan TNKS Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bungo yang berkaitan dengan kinerja petugas TNKS sebagai berikut:

1. Masih kurangnya petugas pelaksana yang melakukan pengawasan di lapangan dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).
2. Sarana dan prasarana petugas lapangan dalam pelaksanaan perlindungan dan pelestarian flora dan fauna di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) kurang memadai.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui serta mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang terjadi pada tempat dan waktu tertentu, kemudian berusaha menganalisa dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi untuk pemecahan masalah mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari populasi. Penelitian menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu teknik penarikan sampel dengan tujuan tertentu, didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat

populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 (sepuluh) orang, yang terdiri dari: Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bungo, Kepala Resort TNKS Bungo, Staf Seksi Urusan Analisis Data pada Seksi Wilayah II Bungo, 4 (empat) orang Polisi Kehutanan Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bungo, 3 (tiga) orang Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP) Taman Nasional Kerinci Seblat Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bungo. Untuk menganalisa data penelitian diaplikasikan model Milles dan Huberman.

3. Hasil dan Pembahasan

Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Jambi terbagi menjadi 2 (dua) Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) masing-masing Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Kerincidan Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bungo. Secara administratif pemerintahan Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bungo terletak di 2 (dua) wilayah kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin, yang dibagi lagi menjadi wilayah kerja di tingkat tapak menjadi 3 (tiga) resort TNKS yaitu Resort TNKS Bungo, Resort TNKS Merangin Utara dan Resort TNKS Merangin Selatan. Adapun luas wilayah kerja ditingkat tapak/resort TNKS pada lingkup Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bungo dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4
Luas kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah II Bungo per Resort

No.	Resort TNKS	Letak Administratif	Luas Kawasan Hutan (Hektar)
1	Resort Bungo	Kabupaten Bungo	86.363,77
2	Resort Merangin Utara	Kabupaten Merangin	60.170,77
3	Resort Merangin Selatan	Kabupaten Merangin	95.885,28
	Jumlah		242.419,82

Sumber. Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), 2019.

TNKS juga memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat di sekitar kawasan konservasi ini diantaranya sebagai daerah tangkapan air (*catchment areas*) bagi beberapa sungai besar di Sumatera.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah sumber daya manusia pada Balai Besar TNKS Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Jambi Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bungo berjumlah 20 orang petugas, termasuk Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bungo.

Dalam hal penataan fungsi kawasan (zonasi) Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) telah dilakukan dan mendapat pengesahan dari Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Tahun 2007. Kemudian pada tahun 2014 dilakukan revisi zonasi. Adapun fungsi kawasan berdasarkan zonasi pada Balai Besar TNKS dapat dilihat pada tabel 8 di bawah ini:

Tabel 8
Fungsi Kawasan Berdasarkan Zonasi pada Balai Besar TNKS

No	Zonasi	Luas Kawasan Hutan (Hektar)
1	Zona Inti	738.831,44
2	Zona Rimba	492.354,28
3	Zona Pemanfaatan	22.738,12
4	Zona Tradisional	11.606,31
5	Zona Rehabilitasi	108.760,23

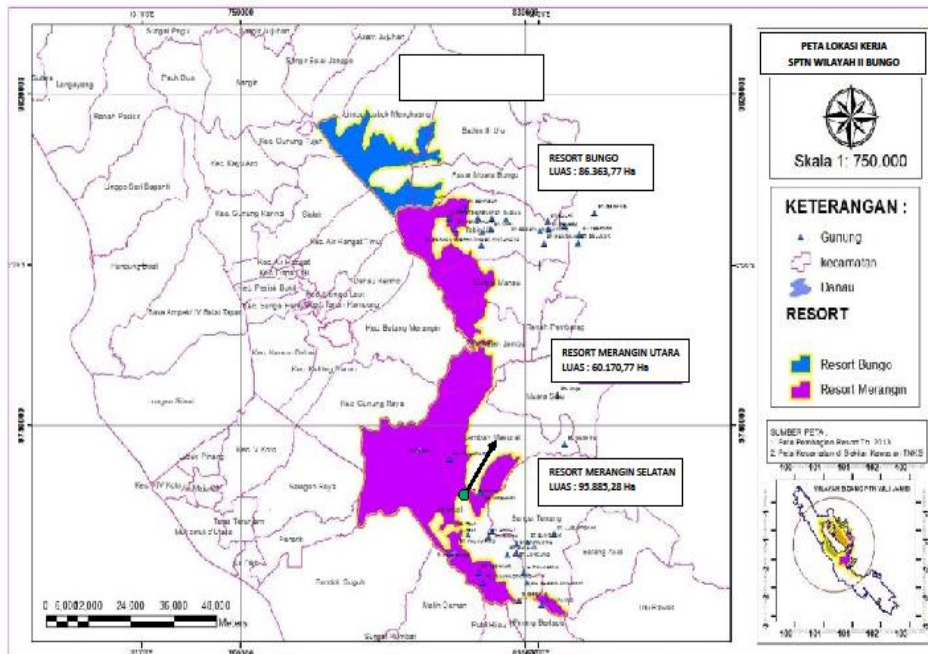
6	Zona Khusus	15.219,39
Luas kawasan TNKS		1.389.509,90

Sumber: Balai Besar TNKS BPTN I Wilayah I Jambi SPTN Wilayah II Bungo, Tahun 2019.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa fungsi kawasan hutan TNKS menjadi 6 (enam) zonasi yang terdiri dari : Zona Inti, Zona Rimba, Zona Pemanfaatan, Zona Tradisional, Zona Rehabilitasi dan Zona Khusus, yang pembagian peruntukan kawasan Taman Nasional ke dalam zona bersifat khas untuk masing-masing kawasan (*site specific*) sesuai dengan kondisi lingkungan (biofisik) serta sosial ekonomi dan budaya daerah sekitarnya. Akibat adanya kegiatan manusia dan alam, kondisi lingkungan ini bervariasi dari satu kawasan ke kawasan lainnya. Dalam suatu kawasan taman nasional, khususnya dengan luasan yang besar seperti halnya TNKS, maka penyusunan zonasi merupakan langkah utama sebagai landasan atau dasar, baik untuk kebutuhan operasional manajemen maupun kekuatan hukum (*legal formal*) dalam pengelolaan Taman Nasional.

Peta Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang menjadi Wilayah Kerja Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bungo, dapat dilihat pada gambar 3 di bawah ini:

Gambar 3
Peta Kerja Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bungo



Sumber. Balai Besar TNKS, SPTN Wilayah II Bungo, Tahun 2019.

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa secara administratif pemerintahan Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bungo terletak di 2 (dua) wilayah kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin, yang dibagi lagi menjadi 3 (tiga) wilayah kerja di tingkat tapak yaitu Resort TNKS Bungo, Resort TNKS Merangin Utara dan Resort TNKS Merangin Selatan. Luas wilayah kerja Resort TNKS Bungo mencapai 86.363,77 hektar, Resort TNKS Merangin Utara sekitar 60.170,77 hektar dan Resort TNKS Merangin Selatan lebih kurang 95.885,28 hektar. Luas wilayah kerja Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bungo mencapai 242.419,82 hektar.

3.1. Kinerja Petugas Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bungo dalam Melindungi dan Melestarikan Flora dan Fauna.

Kinerja dalam suatu kelompok atau organisasi merupakan suatu jawaban atas berhasil atau tidaknya tujuan kelompok ataupun organisasi tersebut yang telah ditetapkan sehingga seseorang petugas atau pegawai dalam melaksanakan tugasnya selama periode tertentu yang dapat diukur berdasarkan ukuran yang berlaku dalam organisasi, salah satunya adalah kinerja Petugas atau Polisi Kehutanan bertugas mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan mempertahankan serta menjaga kelestarian hutan sebagai sumber daya alam. Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka tugas dan tanggungjawab berada pada pundak petugas Balai Besar TNKS dalam pelaksanaan pengelolaan maupun pengawasan hutan guna melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati berupa flora dan fauna.

Dalam hal penilaian kinerja petugas/pegawai ditujukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja petugas/pegawai dengan meningkatkan kinerja dari Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk mengetahui kinerja petugas Balai Besar TNKS Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bungo dalam melindungi dan melestarikan flora dan fauna, peneliti menggunakan teori Achmad S. Supriyanto dan Masyhuri Machfudz, *Metodologi Riset Manajemen Sumber Daya Manusia*, UIN Malang Press, Malang 2010, hal. 284-285. Ada 6 (enam) indikator sebagai acuan yang digunakan peneliti dalam melakukan observasi dan wawancara dengan narasumber, sebagai berikut:

1. *Quality*, adalah tingkat sejauh mana proses atau hasil pelaksanaan kegiatan mendekati kesempurnaan atau dengan kata lain mendekati tujuan yang diharapkan.

Hasil wawancara dengan Itno Itoyo, S.Hut., M.Sc selaku Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bungo, Johan Simorangkir Kepala Resort TNKS Bungo dan Darlin Purba Anggota Polhut Resort TNKS Bungo. Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa dari kualitas kerja petugas Balai TNKS Seksi pengelolaan Wilayah II Bungo masih belum optimal karena masih kurangnya fasilitas pendukung dalam menyelesaikan pekerjaan, seperti : pondok kerja/pos jaga resort, kendaraan operasional roda 4 dan roda 2, GPS (*Geographic Positioning System*), Kamera, Kompas, dsb.

2. *Quantity*, merupakan jumlah yang dihasilkan dalam aktivitas kerja, misalnya jumlah rupiah, jumlah unit, dan jumlah siklus kegiatan yang telah diselesaikan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan kinerja sudah dilaksanakan dari sisi kegiatan patroli belum terlaksana secara rutin, artinya masih belum optimal karena belum adanya pos jaga atau pondok kerja di kawasan TNKS khususnya Resort TNKS Bungo dan ditambah lagi kurangnya jumlah petugas pengawas di lapangan lingkup Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bungo.

3. *Time Liness*, adalah sejauh mana suatu kegiatan dapat diselesaikan tepat pada waktu yang dikehendaki dengan memperhatikan koordinasi dengan output lainnya serta waktu yang tersedia untuk yang lain.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa dari sisi waktu penyelesaian pekerjaan sudah baik karena masih jaranganya Surat Perintah Tugas untuk kegiatan ke lapangan, jadi tersedia waktu yang cukup banyak untuk menyelesaikan satu pekerjaan.

4. *Cost Effectiviness*, adalah sejauh mana penggunaan sumber daya organisasi (manusia, modal, teknologi, dan material) dapat dimaksimalkan untuk mencapai hasil yang tertinggi atau pengurangan terhadap kerugian dari setiap unit penggunaan sumber daya.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa dari segi penganggaran masih minim dan belum optimal karena masih bersifat perintah tugas dan sebatas jumlah pengeluaran anggaran rutin bulanan, jadi belum ada pengelolaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga mandiri dan hal ini dalam setiap kegiatan mengalami ketergantungan kepada organisasi kantor eselon di atasnya. Untuk mengoptimalkan tugas atau kinerja petugas Balai TNKS dengan dana minim dibentuklah Masyarakat Mitra Polhut (MMP)

sebagai perpanjangan dalam memberikan informasi gangguan yang terjadi di sekitar dan dalam kawasan TNKS.

5. *Need for Supervision*, adalah tingkat sejauh mana seorang pegawai/petugas/karyawan dapat melaksanakan suatu fungsi pekerjaan tanpa memerlukan pengawasan oleh seorang atasan atau supervisor untuk mencegah dan meminimalisir tindakan yang tidak diinginkan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa petugas Balai Besar TNKS Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bungo sudah mampu melaksanakan dan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya secara mandiri, contoh: setiap petugas/pegawai setiap bulan harus melaporkan e-kinerja dan disampaikan kepada Bagian Tata Usaha Balai Besar TNKS cq. Subbag Umum. Kemudian wajib membuat DUPAK (Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit), apabila petugas/pegawai rumpun jabatan fungsional tidak membuat DUPAK maka tidak akan pernah naik pangkat.

6. *Interpersonal Impact*, adalah tingkat sejauh mana pegawai memelihara harga diri, nama baik, dan kerjasama diantara rekan dan bawahan.

“*Interpersonal impact* yang dimaksudkan agar tidak terjadi konflik internal pada petugas Balai Besar TNKS SPTN Wilayah II Bungo, walaupun pernah terjadi perselisihan diantara petugas Polisi Kehutanan, namun ada penunjukan Ketua Tim yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan konflik, dan aktivitas patroli tetap terlaksana dengan baik”.

Dari hasil wawancara secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kinerja petugas Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bungo dalam melindungi dan melestarikan flora dan faunasudah dijalankan sesuai dengan Petunjuk Teknis yang ada, namun masih belum optimal karena terbatasnya anggaran, kurangnya jumlah petugas pengawasan di lapangandan belum memadainya sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan itu sendiri.

4.2 Kendala yang dihadapi pihak Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bungo dalam Melindungi dan Melestarikan Flora dan Fauna.

1. Masih kurangnya petugas pelaksana yang melakukan pengawasan di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)

Jumlah petugas Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bungo dalam melindungi dan melestarikan flora dan fauna, periode 2014 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada tabel 9 berikut:

Tabel 9
Jumlah Petugas Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bungo

No	Petugas SPTN Wilayah II	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	PNS :					
	1. Resort Bungo	6	6	6	4	4
	2. Resort Merangin Utara	0	0	0	3	3
	3. Resort Merangin Selatan	4	4	4	4	4
	4. SPTN Wilayah II Bungo	4	4	4	4	4
2	MMP (Masyarakat Mitra Polhut)	0	0	0	6	6
	Jumlah	14	14	14	20	20

Sumber. Balai Besar TNKS, Seksi PTN Wilayah II Bungo, 2019

Menurut Itno Itoyo selaku Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bungo, beliau menyampaikan: “...Jumlah personil pelaksana yang ada di SPTN Wilayah II

Bungo sangat terbatas, dimana untuk melaksanakan kegiatan patroli dengan luas kawasan pada areal kerja SPTN Wilayah II Bungo ±86.363,77 hektar adalah sangat luas, sementara petugas SPTN Wilayah II Bungo dan Resort TNKS Bungo hanya ada 8 orang untuk melakukan patroli, dan hal tersebut tidak ideal dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugasnya dalam rangka melindungi flora dan fauna. Untuk idealnya Resort Bungo harus memiliki petugas pengawasan sebanyak 14 orang petugas. Dengan asumsi 1km² adalah 100 hektar x 3 km = 300 hektar/hari. 300 hektar/hari x 22 hari kerja = 6.600 hektar/bulan. Untuk mengawasi areal kawasan hutan seluas 86.363,77 hektar maka 86.363,77 hektar : 6.600 hektar/orang = 13,0854197 dengan pembulatan menjadi 14 orang”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Balai Besar TNKS SPTN Wilayah II Bungo masih kekurangan jumlah petugas/pegawai selaku sumber daya manusia yang bertugas dalam pengawasan flora dan fauna, sehingga menyebabkan belum optimalnya kinerja petugas Balai Besar TNKS SPTN Wilayah II Bungo.

Menurut Johan Simorangkir, Kepala Resort TNKS Bungo, menyampaikan bahwa: “...saat jika kami melaksanakan patroli di kawasan hutan TNKS dalam setiap harinya hanya mampu berjalan kaki sejauh ± 3Km setiap harinya dan dilakukan oleh 3 sampai 4 orang petugas, sementara luas kawasan TNKS wilayah Bungo ±86.363,77 hektar, jadi sangat sulit bagi kami melaksanakan tugas perlindungan flora dan faunanya mengingat banyaknya jenis flora dan fauna yang dilindungi yang berada di kawasan TNKS Wilayah II Bungo”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kurangnya sumber daya manusia atau petugas pelaksana patroli yang melakukan pengawasan di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) menjadi kendala bagi pihak Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bungo dalam melindungi dan melestarikan flora dan fauna.

2. Sarana dan prasarana untuk petugas dalam pelaksanaan perlindungan dan pelestarian flora dan fauna di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) kurang memadai.

Menurut Johan Simorangkir, Kepala Resort TNKS Bungo, menyampaikan bahwa: “...Untuk sarana dan prasarana baik kendaraan patroli, GPS (*Geographic Position System*), kamera dan kompas sangat dibutuhkan dan perlu penambahan jumlah supaya didalam melaksanakan patroli dapat berjalan dengan baik. Sedangkan untuk prasarana bangunan untuk kantor Resort TNKS Bungo saat ini masih dalam proses rencana pembangunan dan mudah-mudahan di tahun 2019 ini bisa terealisasi”.

Menurut Darlin Purba, Anggota Polhut Resort TNKS Bungo menyampaikan bahwa: “...Sarana prasarana kendaraan sangat terbatas karena kendaraan patroli operasional Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bungo hanya 1 (satu) unit sehingga apabila tim melakukan patroli harus bergiliran dan begitu juga alat-alat pengukuran lapangan lainnya seperti : GPS, kamera, kompas, untuk itu diharapkan untuk melakukan penambahan alat-alat maupun sarana dan prasarana”.

Hasil wawancara dengan Muhammad Abdullah Saksi, Anggota Polhut Resort TNKS Bungo menyampaikan bahwa: “...Sarana prasarana belum cukup yakni menyangkut kendaraan roda 4 patroli yang dipakai oleh 3 (tiga) Resort TNKS yaitu : Resort TNKS Bungo, Resort TNKS Merangin Utara dan Resort TNKS Merangin Selatan, sementara kendaraan patroli roda 4 hanya 1 (satu) unit, GPS hanya tersedia 1 (satu) unit. Efektifnya 1 (satu) Resort 1 (satu) unit. Kamera standard untuk melakukan patroli adalah kamera berbasis zoom memakai teleskop dan SPTN Wilayah II Bungo tidak memiliki unit tersebut, sementara pemotretan menggunakan kamera pribadi masing-masing personil”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kendala bagi pihak Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bungo dalam melindungi dan melestarikan flora dan fauna bahwa sarana dan prasarana pada kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bungo, seperti: kendaraan operasional patroli mobil (kendaraan roda 4) berjumlah 1 unit dan motor (kendaraan roda 2) berjumlah 2

unit, GPS (*Geographic Position System*) berjumlah 1 unit, kamera berjumlah 1 unit dalam keadaan rusak dan kompas suunto belum dimiliki. Peralatan-peralatan tersebut sangat dibutuhkan dalam kegiatan patroli pengawasan di lapangan. Karena jumlahnya masing-masing sangat kurang maka perlu dilakukan penambahan supaya didalam melaksanakan patroli pengawasan di lapangan dapat berjalan dengan baik dan mencapai data dan target patroli lapangan sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK). Sedangkan untuk prasarana bangunan pondok kerja/pos jaga Resort TNKS Bungo yang seharusnya berada di sekitar kawasan hutan TNKS saat ini belum ada, masih sebatas tanah saja ukuran 20 meter persegi. Idealnya 1 (satu) kecamatan ada 1 (satu) pondok kerja/pos jaga Resort Polhut TNKS yang sangat berguna dalam menunjang aktifitas pengawasan di lapangan.

4.3 Upaya yang dilakukan pihak Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bungo guna mengatasi masalah-masalah tersebut.

a. Menambah Jumlah Petugas Balai Besar TNKS Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bungo

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan pihak Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bungo guna melindungi dan melestarikan flora dan fauna, salah satunya meningkatkan kerjasama dengan masyarakat, dengan membentuk Masyarakat Mitra Polhut (MMP) TNKS sebagai perpanjangan tangan dalam memperoleh informasi mengenai kawasan hutan TNKS termasuk informasi jika adanya gangguan terhadap keberadaan flora dan fauna.

b. Mengajukan Usulan Pengadaan Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil wawancara upaya lain yang dilakukan pihak Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bungo guna melindungi dan melestarikan flora dan fauna adalah mengajukan usulan pengadaan sarana dan prasarana, dalam hal ini barang bergerak dan tidak bergerak, seperti : pengadaan kendaraan operasional patroli (kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2), pengadaan GPS (*Geographic Position System*) untuk masing-masing tim operasional yaitu : 1 unit untuk SPTN Wilayah II Bungo, 1 unit Resort TNKS Bungo, 1 unit Resort TNKS Merangin Utara dan 1 unit Merangin Selatan.

c. Pelaksanakan Pendidikan dan Pelatihan bagi Petugas

Berdasarkan wawancara dengan Kepala SPTN Wilayah II Bungo, Kepala Resort TNKS Bungo dan Anggota Polisi Kehutanan Resort TNKS Bungo bahwa untuk meningkatkan profesionalitas kinerja petugas Balai Besar TNKS maka upaya yang dilakukan adalah mengikutsertakan petugas dalam pendidikan dan pelatihan (Diklat) guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta memberikan penyegaran dan menambah pengetahuan serta wawasan petugas dalam menegakkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Kesimpulan

1. Kinerja petugas Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bungo dalam melindungi dan melestarikan flora dan fauna sudah dijalankan sesuai dengan Petunjuk Teknis, pengukuran kinerja petugas Balai Besar TNKS Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bungo menggunakan indikator kinerja teori Achmad S. Supriyanto dan Masyhuri Machfudz, *Metodologi Riset Manajemen Sumber Daya Manusia*, UIN Malang Press, Malang 2010. Ada 6 (enam) indikator yang digunakan yang menjadi dasar pengukuran yaitu : *Quality*, kualitas kerja petugas Balai Besar TNKS Seksi pengelolaan Wilayah II Bungo dalam melindungi dan melestarikan flora dan fauna masih belum optimal karena kurangnya fasilitas pendukung

dalam melaksanakan tugas di lapangan. *Quantity*, bahwa pelaksanaan kinerja sudah dilaksanakan dari sisi kegiatan patroli namun belum terlaksana secara rutin, artinya masih belum optimal karena belum adanya pos jaga atau pondok kerja di kawasan TNKS khususnya Resort TNKS Bungo dan ditambah lagi kurangnya jumlah petugas pengawas di lapangan lingkup Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bungo. *Time Liness*, bahwa dari sisi waktu penyelesaian pekerjaan sudah baik karena masih jarang nya Surat Perintah Tugas untuk kegiatan ke lapangan, jadi tersedia waktu yang cukup banyak untuk menyelesaikan satu pekerjaan. *Cost Effectiviness*, bahwa dari segi penganggaran masih minim dan belum optimal karena masih bersifat perintah tugas dan sebatas jumlah pengeluaran anggaran rutin bulanan, jadi belum ada pengelolaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga mandiri dan hal ini dalam setiap kegiatan mengalami ketergantungan kepada organisasi kantor eselon di atasnya. *Need for Supervision*, bahwa petugas Balai Besar TNKS Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bungo sudah mampu melaksanakan dan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya secara mandiri. *Interpersonal Impact*, dimaksudkan agar tidak terjadi konflik internal pada petugas Balai Besar TNKS SPTN Wilayah II Bungo. Dapat disimpulkan dari teori ini bahwa kinerja petugas Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bungo dalam melindungi dan melestarikan flora dan fauna sudah dijalankan sesuai dengan Petunjuk Teknis yang ada, namun masih belum optimal karena terbatasnya anggaran, kurangnya jumlah petugas pengawasan di lapangandan belum memadainya sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan itu sendiri.

2. Kendala yang dihadapi pihak Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bungo dalam melindungi dan melestarikan flora dan fauna adalah masih kurangnya petugas pelaksana yang melakukan pengawasan di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) karena jumlah sumber daya manusia atau petugas yang ada tidak ideal dibandingkan luas kawasan TNKS Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bungo. Dengan luas kawasan mencapai ±86.363,77 hektar berbanding 4 orang petugas/pegawai Resort TNKS Bungo sangatlah tidak ideal, untuk idealnya diperlukan 14 orang petugas/pegawai dengan asumsi 1 orang petugas mengawasi sekitar 6.168,84 hektar kawasan hutan. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugasnya dalam rangka melindungi dan melestarikan flora dan fauna, sarana dan prasarana Balai Besar TNKS Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bungo kurang memadai dan kurang jumlah, seperti : kendaraan operasional patroli roda 4 hanya 1 (satu) unit, kendaraan roda 2 ada 2 (dua) unit, GPS (*Geographic Position System*) hanya tersedia 1 (satu) unit, kamera 1 (satu) unit dalam kondisi rusak, kompas suunto belum ada.
3. Upaya yang dilakukan pihak Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bungo guna mengatasi masalah-masalah tersebut adalah meningkatkan kerjasama dan komunikasi dengan masyarakat sekitar kawasan hutan TNKS, selain kegiatan penyuluhan/sosialisasi TNKS juga dengan membentuk kemitraan Masyarakat Mitra Polhut (MMP) sebagai perpanjangan tangan pihak TNKS dalam memperoleh informasi mengenai gangguan kawasan hutan TNKS. Upaya lainnya dengan mengajukan pengadaan sarana dan prasarana pendukung utama dalam pelaksanaan pengawasan/patroli lapangan, seperti : kendaraan patroli baik roda 4 maupun roda 2, pengadaan GPS, kamera zoom, kompas suunto, kelengkapan personil/petugas (*personal use*), bangunan pos jaga/pondok kerja resort yang penganggarnya bisa bersumber dari DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran) Balai Besar TNKS dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan keterampilan dan kemampuan Petugas pelaksana kegiatan pada Balai Besar TNKS khususnya Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bungo dalam melindungi dan melestarikan flora dan fauna.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang sudah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bungo yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya untuk memberikan data, informasi berkaitan penelitian ini. Kepada ibu Nanik Istianingsih, S.E.,M.E selaku ketua LPPM yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan penelitian, dan kepada semua kawan-kawan yang tidak disebutkan namanya satu persatu yang telah telah memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Semoga semua kebaikan dibalas oleh Allah SWT. Aamiin.

Daftar Pustaka

Buku

- Abu Daud Busroh, (2010). *Ilmu Negara*, Ed. 1, Cet. 7, Bumi Aksara, Jakarta.
- Achmad S. Supriyanto dan Masyhuri Machfudz,(2010). *Metodologi Riset Manajemen Sumber Daya Manusia*, UIN Malang Press, Malang.
- A.A Anwar Prabu Mangkunegara,(2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Indah Puji Hartatik, (2014). *Mengembangkan Sumber Daya Manusia*, Laksana, Yogyakarta.
- Inu Kencana Syafie, (2003). *Sistem Administrasi Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Jimmy L. Goal, (2008). *Sistem Informasi Manajemen Pemahaman dan Aplikasi*, Grasindo, Jakarta.
- Leo Agustini, (2010). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Lexy J. Moleong, (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Malayu SP Hasibuan, (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mohammad Pabundu Tika, (2006). *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja*, Jakarta.
- Sedarmayanti, (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia. Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, Refika Aditama, Bandung.
- Solihin Abdul Wahab, (2008). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, UPT Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Sondang P Siagian, (2011). *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Harbani Pasolong, (2012). *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Henry Simamora, (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, STIE YKPN, Yogyakarta.
- Peter Salim dan Yenni Salim, (2002). *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Suharno, (2010). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Yogyakarta, UNY Press.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*.
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang *Kehutanan*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang *Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang *Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa*
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MenLHK/Sekjen/kum.1/6/2018 tentang *Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi*.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang *Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya*.

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 901/KPTS-II/1999 tentang *Penetapan kawasan TNKS yang terletak di Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu seluas 1.375.349,867 hektar.*

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 420/Menhut-II/2004 tentang *Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi di Sipurak Hook seluas ± 14.160 hektar Menjadi Bagian Dari Kawasan TNKS, sehingga luas TNKS menjadi ± 1.389.509,867 hektar.*

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2016 tentang *Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai.*

Keputusan Kepala Balai Besar TNKS Nomor SK. 312 /IV-10/DIPA/KSDAE/2015 Tentang *Rencana Strategis Balai Besar TNKS Tahun 2015-2019.*

Kamus

Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* Terbaru, Amelia, Surabaya, 2012.

Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, DITJEN PHKA. *Sungai Penuh*, 2002.